

LAPORAN PENELITIAN MADYA

BIDANG KEILMUAN



**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN
BANGGAE TIMUR KABUPATEN MAJENE**

Oleh :

Safriansyah

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
2012**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN MADYA BIDANG KEILMUAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS TERBUKA

1. a. Judul Penelitian : Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
- b. Bidang Penelitian : Keilmuan
- c. Klasifikasi Penelitian : Madya
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Safriansyah, S.Sos. M.Si.
- b. NIP : 19810417 200801 1 009
- c. Golongan Kepangkatan : Asisten Ahli / III.b
- d. Jabatan Akademik : FISIP / UPBJJ-UT Majene
- Fakultas/Unit Kerja
- e. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
3. Anggota Peneliti
- a. Jumlah Anggota : -
- b. Nama Anggota/Unit Kerja : -
- c. Program Studi : -
4. a. Periode Penelitian : Tahun 2012
- b. Lama Penelitian : 6 (Enam) Bulan
5. Biaya Penelitian : Rp 16.824.800,- (Enam Belas Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)
6. Sumber Biaya : Universitas Terbuka
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian : Publikasi Ilmiah dan Jurnal

Mengetahui,
Kepala UPBJJ-UT Majene

Ketua Peneliti,

Drs. Arifin Tahir, S.Pd. M.Pd.
NIP. 19611231 198703 1 021

Safriansyah, S.Sos. M.Si.
NIP. 19810417 200801 1 009

Menyetujui,
Ketua LPPM

Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan

Dewi Artati Padmo Putri
NIP. 19610724 198701 2 001

Endang Nugraheni
NIP. 19570422 198503 2 001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Ringkasan	iii
Prakata	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
A. Pendahuluan	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	
3. Tujuan Penelitian	
4. Manfaat Penelitian	
B. Tinjauan Pustaka	
1. Konsep Implementasi	
2. Faktor-Faktor Pengaruh Proses Implementasi	
3. Konsep pemberdayaan	
C. Metodologi Penelitian	
1. Lokasi dan Waktu Penelitian	
2. Informan Penelitian	
3. Instrumen Penelitian	
4. Teknik Pengumpulan Data	
5. Teknik Analisis Data	
D. Hasil dan Pembahasan	
1. Deskripsi Wilayah	
2. Deskripsi PNPM Mandiri Perdesaan	
3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PNPM Mandiri Perdesaan	
a. Faktor Komunikasi	
b. Faktor Sumber Daya	
c. Faktor Sikap Pelaksana	
d. Faktor Struktur Organisasi	
E. Kesimpulan dan Saran	
1. Kesimpulan	
2. Saran	
F. Daftar Pustaka	

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) adalah salah satu program pemerintah yang dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk menanggulangi kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan dana kepada masyarakat untuk penataan infrastruktur, ekonomi dan sosial tetapi juga mengutamakan terjadinya proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya menjadi berdaya menuju kemandirian guna mewujudkan masyarakat yang madani. Selain itu, seluruh proses kegiatan dalam program ini dilakukan oleh masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan dengan mengikuti prosedur atau pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya dengan melalui pembelajaran dan pelatihan yang difasilitasi oleh tim fasilitator (www.pnpm-perdesaan.or.id).

Kabupaten Majene adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang telah menjalankan program ini. Berbagai kegiatan-kegiatan telah dilakukan dan direalisasikan mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan sampai ke tingkat desa dan dusun, seperti kegiatan penyuluhan dan pelatihan, pembangunan infrastruktur, perbaikan sarana umum dan sarana pendidikan, dan pembentukan kelompok masyarakat yang menjadi ruang lingkup kegiatan program ini.

. PNPM-MP telah sesuai pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Majene mengingat masih banyak masyarakatnya yang tergolong miskin, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir (masyarakat nelayan). Dan berdasarkan data BPS Kabupaten Majene bahwa pada tahun 2010 jumlah penduduk yang dikategorikan miskin di wilayah Kabupaten Majene adalah sebanyak 27.800 orang (18,42 %) dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Majene sebanyak 151.107 orang (www.majenekab.bps.go.id).

Selain itu, jumlah kecamatan yang terdapat di Kabupaten Majene sebanyak 8 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Banggae Timur. Kecamatan ini merupakan pecahan dari Kecamatan Banggae yang merupakan ibu kota Kabupaten Majene. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Banggae Timur pada tahun 2010 adalah sebanyak 28.550 yang tersebar di 5 desa/kelurahan (www.majenekab.go.id).

Pelaksanaan PNPM-MP dilakukan dengan pola pendekatan partisipasi masyarakat, di mana masyarakat dengan kesadaran dan tanggung jawabnya menghimpunkan diri dalam wadah atau lembaga keswadayaan yang difungsikan sebagai wadah aspirasi, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan konsep Tridaya, yaitu penataan lingkungan, pembangunan sosial dan pengembangan ekonomi. Melalui wadah ini masyarakat dapat berpartisipasi secara langsung dalam pembangunan berkelanjutan.

Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan pemerintah secara bertahap untuk pembangunan Tridaya dikelola dan

dimanfaatkan langsung oleh masyarakat secara umum. Dengan dana tersebut, program dan pelaksanaannya menyentuh kepentingan masyarakat dan mampu membangun aset dan perekonomian kerakyatan yang tertata, berkualitas dan berkelanjutan. Bahkan masyarakat dengan sukarela berswadaya menyumbangkan pikiran, tenaga, waktu, aset dan materi untuk kepentingan pembangunan daerah. Dan tahun 2011, berdasarkan DIPA Anggaran 2011 Menko Kesra No. B. 210/MENKO/KESRA/2010 tanggal 5 November 2011 bahwa Kecamatan Banggae Timur mendapatkan alokasi anggaran untuk PNPM-MP sebesar Rp 2.250.000.000,-, yang terdiri atas : APBN = Rp 1.800.000.000,- dan APBD = Rp 450.000.000,- (www.pnpm-perdesaan.or.id)

Jadi, berdasarkan gambaran umum dari pelaksanaan PNPM-MP di atas maka kami sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini dengan judul ***“Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ?
- b. Faktor-faktor apakah yang mendukung proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ?

- c. Faktor-faktor apakah yang menghambat proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.
- b. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene
- c. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diharapkan dari penelitian ini, yaitu :

- 1. Secara akademis :
 - ❑ Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

- ❑ Sebagai bahan atau sumber referensi untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Secara Praktis :

- ❑ Sebagai bahan masukan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten Majene untuk mendukung, membantu dan mengambil langkah-langkah strategis dan teknis dalam pelaksanaan program ini.
- ❑ Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pelaksana program untuk mencari cara atau strategi yang lebih baik dalam proses pelaksanaan program sehingga sasaran dan tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi

Studi implementasi menurut Effendi (1999) pada dasarnya merupakan suatu analisis yang mendalam tentang implementasi kebijakan publik. Tujuan studi implementasi yang paling pokok adalah mengkaji bagaimana kinerja suatu kebijakan publik serta mengkaji secara kritis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan dalam pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan mempunyai fungsi membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik yang diwujudkan sebagai suatu dampak (*out comes*) yang dapat dicapai. Sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dengan melakukan studi implementasi kebijakan publik, kita dapat melakukan pendeteksian awal apakah program telah berjalan sesuai dengan relnya atautkah tidak. Apabila implementasi program ridak sesuai dengan rancangan kebijakan atau program, pada akhirnya dapat diberikan berbagai alternatif solusi untuk memperbaiki program sesuai dengan tujuan kebijakan.

Suatu kebijakan yang telah diformulasikan dengan baik bukan merupakan jaminan akan dapat pula diimplementasikan dengan baik, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ripley (1980) yang menyatakan bahwa kebijakan yang telah diformulasikan dengan baik tidak selalu dapat

diimplementasikan dengan baik. Demikian pula menurut Udoji (dalam Abdul Wahab, 1997) menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip-arsip kalau tidak diimplementasikan.

Kemudian, Ripley dan Franklin (1986) juga menyatakan bahwa implementasi adalah sesuatu yang terjadi setelah keputusan suatu program, kebijakan, keuntungan atau beberapa kebijakan lain yang diterapkan. Begitu pula menurut Mazmanian dan Sabatier (1986) menyatakan bahwa implementasi berarti kita berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dilaksanakan akan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan publik baik yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak yang nyata kepada masyarakat.

B. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses implementasi

Menurut Edwards III (1980), tahap implementasi kebijakan merupakan tahap di antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran. Dalam konsep implementasi tersebut Edwards III menggunakan empat variabel faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Organisasi. Keempat variabel tersebut

merupakan variabel yang secara langsung maupun yang secara tidak langsung mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik.

1. Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan salah satu unsur penting dalam implementasi kebijakan publik karena melalui komunikasi akan dapat menjalin saling pengertian, memahami, mengetahui informasi antara pihak implementor dengan pihak kelompok sasaran kebijakan. Selain itu, suatu kebijakan atau program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas para pelaksananya, dalam hal ini menyangkut penyampaian informasinya, kejelasan informasi tersebut, dan konsistensi dari informasi yang disampaikan.

2. Sumber Daya

Faktor ini meliputi empat komponen, yakni staf yang cukup (jumlah dan mutunya), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atas tanggung jawab, dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan atau program.

3. Sikap Pelaksana

Faktor ini melihat sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan, khususnya dari mereka yang implementor program dalam hal ini terutama dimaksudkan adalah aparatur birokrasi.

4. Struktur Organisasi

Faktor ini melihat adanya SOPs (*Standard Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan atau program. Jika dalam hal ini SOPs tidak ada maka akan sulit sekali mencapai hasil yang memuaskan, karena segala sesuatu yang bersifat *ad hoc* akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang jelas.

C. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yakni kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak berdasarkan akal, ikhtiar atau usaha (Depdiknas, 2003). Pada dasarnya konsep ini ditujukan untuk menjawab fenomena kemiskinan dan mendorong terciptanya keadilan dalam masyarakat. Dalam perspektif pemberdayaan, terjadinya kemiskinan lebih disebabkan oleh faktor struktural bukan semata-mata disebabkan karena ketidakmampuan si miskin. Hal ini disebabkan oleh terjadinya pelemahan daya kemampuan terhadap golongan miskin karena adanya ekspansi kapitalisme global pada struktur internasional dan melalui praktek pembangunan negara berkembang pada struktur nasional dan lokal (Sen, 2002).

Selanjutnya, dikatakan oleh Sen (2002) bahwa terdapat tiga jenis kemampuan pada golongan miskin yang terlemahkan, yakni:

- (1) Daya sosial (*social capability*), berupa akses pada basis produksi rumah tangga seperti lahan, sumber keuangan, informasi, pengetahuan dan keterampilan serta partisipasi dalam organisasi sosial.
- (2) Daya politik (*political capability*), berupa akses individu dalam pengambilan keputusan politik, yang diartikan bukan sekedar ikut memilih melainkan juga dalam menyuarakan aspirasi dan bertindak secara kolektif.
- (3) Daya psikologis (*psychological capability*), berupa kesadaran akan potensi diri baik di bidang sosial maupun bidang politik.

Jadi pemberdayaan tidak lain adalah proses di mana golongan miskin difasilitasi, didorong dan diperkuat untuk meraih kembali sejumlah daya atau potensi yang terlemahkan itu.

Sementara itu, Narayan (2002) mendefinisikan pemberdayaan (*empowerment*) sebagai peningkatan aset dan kemampuan orang miskin untuk terlibat dalam negosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan mendorong akuntabilitas lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Definisi tersebut mengasumsikan bahwa melalui peningkatan aset dan kemampuan tersebut, daya kemampuan orang miskin yang terlemahkan dapat meningkat kembali.

Aset berkenaan dengan sumberdaya fisik dan finansial dalam suatu komunitas, baik individual maupun kolektif, yang berfungsi memperluas pilihan bagi si miskin dalam kehidupannya. Sedangkan kemampuan atau kapabilitas berkaitan dengan kemampuan si miskin dalam memanfaatkan aset untuk kehidupan yang mencakup : produktivitas, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, akses politik, kebebasan berorganisasi, dan sebagainya.

Terjadinya peningkatan aset dan kemampuan tersebut didasarkan pada asumsi bahwa berbagai program pembangunan menempatkan orang miskin sebagai targetnya. Artinya, melalui berbagai program yang didesain sedemikian rupa itu membuat orang miskin memperoleh efek berupa peningkatan aset dan kemampuan. Asumsi tersebut tentunya hanya akan terwujud jika format pemerintahan telah dibuat sedemikian rupa yang selain memihak pada pemberdayaan masyarakat lokal, juga memberikan ruang yang cukup bagi berkembangnya demokrasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang diadakan di Kecamatan Banggae Timur. Selain itu, lokasi penelitian tidak terlalu jauh dari wilayah domisili peneliti sehingga data-data yang ingin dikumpulkan dapat dijangkau dengan mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian, yaitu mulai bulan April sampai dengan bulan Oktober tahun 2012.

B. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, pemahaman serta mampu memberikan gambaran yang nyata tentang situasi dan kondisi yang sebenarnya terhadap proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan di wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene sehingga informasi yang diterima dapat betul-betul akurat dan faktual.

Adapun pengklasifikasian informan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Camat Banggae Timur yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai arah dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Banggae Timur Kabupaten Majene.

- b. Lurah atau Kepala Desa yang berada di wilayah Kecamatan Banggae Timur yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bentuk-bentuk pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Banggae Timur Kabupaten Majene.
- c. Fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang ditempatkan di wilayah Banggae Timur yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secara teknis.
- d. Tokoh masyarakat dan masyarakat yang berperan serta dalam PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah Kecamatan Banggae Timur yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat dengan terlaksananya program ini.

Berdasarkan pengklasifikasian di atas, dapat ditentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* di mana informan ditentukan secara sengaja berdasarkan pemikiran logis dan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan (Moleong, 2001).

Adapun informan dan informasi yang ditentukan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Informan dan Informasi Penelitian

No.	Informasi yang diinginkan	Informan		Jumlah (orang)
		Unit/Instansi	Jabatan	
1	Kebijakan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Banggae Timur Kab. Majene, meliputi : - sosialisasi - perencanaan - pengorganisasian, dan - pelaksanaan	Kec. Banggae Timur Kab. Majene	Camat Banggae Timur Kab. Majene Staf Kec. Banggae Timur Kab. Majene	2

2	Proses pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kec. Banggae Timur Kab. Majene, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - proses sosialisasi, meliputi rembug kesiapan masyarakat (RKM) dan refleksi kemiskinan (RK) - pemetaan swadaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat - pengorganisasian kelompok swadaya masyarakat (KSM) meliputi : pembentukan lembaga keswadayaan masyarakat (LKM) dan badan keswadayaan masyarakat (BKM) - pelaksanaan kegiatan, meliputi pembagunan sarana prasarana, pelatihan dan penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat - faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan kegiatan 	Kelurahan di Wilayah kec. Banggae Timur Kab. Majene	- Lurah yang berada di wilayah Kec. Banggae Timur - Fasilitator kecamatan	4
3	Proses pelaksanaan program, pemahaman terhadap program, peranan fasilitator, manfaat dari program, kendala yang dihadapi dari pelaksanaan program	Masyarakat di wilayah Banggae Timur Kab. Majene	- Tokoh Masyarakat - Masyarakat yang terlibat	4
	Jumlah			10

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini menetapkan sebanyak 10 informan yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, sekaligus informasi tersebut digunakan untuk mengecek kebenaran tentang berbagai informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Selain itu, pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar waktu yang relatif singkat banyak informasi yang bisa diperoleh dan terjangkau,

karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau bahkan membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subyek lainnya dalam pelaksanaan program (Moleong, 2001).

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah daftar observasi dan daftar pertanyaan. Daftar observasi sebagai pedoman atau panduan dalam melakukan pengamatan dan mendokumentasikan temuan-temuan di lapangan, sedangkan daftar pertanyaan untuk wawancara sebagai pedoman untuk mencatat data-data yang diperlukan dan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan beberapa metode dengan maksud agar data yang diperoleh merupakan data yang sah atau valid dan mampu memberikan gambaran sebenarnya dari kondisi yang ada. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan observasi (pengamatan langsung).

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan PNPM Mandiri Perdesaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi, mendukung dan menghambat

implementasi PNPM. Kemudian pengkriteriaan data-data yang ditemukan dalam penelitian ini didasarkan pada teknik deskriptif kualitatif.

Selain itu, dalam bagian pembahasan interpretasi data dilakukan dengan cara menganalisis data dengan pemahaman intelektual yang dibangun atas dasar pengalaman empiris terhadap fakta, data dan informasi yang dikumpulkan dan disederhanakan dalam bentuk tabel. Kemudian dilakukan penyimpulan data terhadap hasil interpretasi data.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

Kabupaten Majene adalah salah satu dari 5 Kabupaten dalam wilayah propinsi Sulawesi Barat dengan panjang pantai 125 Km yang terlatak di pesisir pantai Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara dengan luas 947,84 Km. Kabupaten Majene terdiri terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammero'do Sendana, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda, yang meliputi 40 desa dan kelurahan.

Ibukota Kabupaten Majene terletak di Kecamatan Banggae dengan luas perkotaan 5.515 km, yang berada di posisi selatan Kabupaten Majene. Secara geografis Kabupaten Majene terletak pada posisi 2' 38' 45" sampai dengan 3' 38' 15" Lintang Selatan dan 118'45' 00" sampai 119'4'45" Bujur Timur, dengan berbatasan di sebelah utara Kabupaten Mamuju, sebelah timur Kabupaten Polewali Mandar, sebelah selatan Teluk Mandar, dan Sebelah Barat adalah Selat Makassar.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Majene



Jumlah penduduk Kabupaten Majene pada tahun 2011 adalah 153.869 jiwa, yang terdiri dari jumlah pria 75.020 jiwa dan jumlah perempuan 78.849 jiwa dengan kepadatan 1.512 jiwa per km untuk Kota Majene (Kecamatan Banggae). Adapun jumlah penduduk Kabupaten Majene per kecamatan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Majene tahun 2011

KECAMATAN	JENIS KELAMIN			RASIO JENIS KELAMIN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
BANGGAE	18 697	19 318	38 015	96,79
BANGGAE TIMUR	13 954	15 117	29 071	92,31
PAMBOANG	10 238	10 943	21 181	93,56
SENDANA	9 960	10 787	20 747	92,33
TAMMERODO	5 281	5 497	10 778	96,07
TUBO SENDANA	4 102	4 262	8 364	96,25
MALUNDA	8 554	8 742	17.296	97,85
ULUMANDA	4 234	4 183	8 417	101,22
JUMLAH	75 020	78 849	153 869	95,14

Sumber: Majene dalam Angka, 2012

Kecamatan Banggae Timur merupakan pecahan dari ibu kota Kabupaten Majene, yaitu Kecamatan Banggae, yang terdiri dari 9 desa/kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Banggae Timur pada tahun 2011 sebanyak 29.071 jiwa sehingga kecamatan ini berada di urutan kedua dalam hal jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Majene. Demikian pula dalam hal kepadatan penduduk, pada tahun 2011 Kecamatan Banggae Timur memiliki jumlah kepadatan penduduk sebesar 968 jiwa/Km². Kepadatan penduduk suatu wilayah menggambarkan banyaknya penduduk yang menempati dan tinggal di wilayah

tersebut setiap Km2. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Banggae Timur per desa/kelurahan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kecamatan Banggae Timur tahun 2011

DESA/KELURAHAN	JENIS KELAMIN			RASIO JENIS KELAMIN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
LABUANG	3 121	3 401	6 522	91,77
LABUANG UTARA	2 528	2 779	5 307	90,97
BAURUNG	2 241	2 258	4 499	99,25
LEMBANG	2 504	2 620	5 124	95,57
TANDE	701	845	1 546	82,96
TANDE TIMUR	845	1 040	1 885	81,25
BARUGA	954	1 043	1 997	91,46
BARUGA DHUA	778	811	1 589	88,12
BUTTU BARUGA	282	320	602	
JUMLAH	13 954	15 117	29 071	92,31

Sumber: Statistik Daerah Kec. Banggae Timur, 2012

Selain itu, jumlah rumah tangga miskin di Kabupaten Majene yang merupakan rumah tangga sasaran dalam program pengentasan kemiskinan berdasarkan hasil PPLS 2011, yaitu sebanyak 19.231 RT. Adapun perinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3 Jumlah Rumah Tangga dengan Klasifikasi Kemiskinan Kabupaten Majene tahun 2011

KECAMATAN	JUMLAH			
	SANGAT MISKIN	MISKIN	HAMPIR MISKIN	MENENGAH LAYAK
BANGGAE	346	402	908	2 504
BANGGAE TIMUR	158	173	466	1 835
PAMBOANG	430	375	754	1 084
SENDANA	350	343	660	1 405
TAMMERODO	111	170	422	714
TUBO SENDANA	138	159	292	788
MALUNDA	223	322	732	1 417
ULUMANDA	177	195	433	745
JUMLAH	1 933	2 139	4 667	10 492

Sumber: Majene dalam Angka, 2012

Kemudian, jumlah rumah tangga miskin di Kecamatan Banggae Timur, yaitu sebanyak 6.304 RT. Adapun perinciannya dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4 Jumlah Keluarga Miskin Kecamatan Banggae Timur tahun 2011

DESA/KELURAHAN	JENIS PRA-SEJAHTERA				JUMLAH
	PRA-SEJAHTERA	KS I	KS II	KS III	
LABUANG	487	823	536	550	2 394
LABUANG UTARA*)	-	-	-	-	-
BAURUNG	363	963	315	386	2 027
LEMBANG*)	-	-	-	-	-
TANDE	154	156	180	296	786
TANDE TIMUR*)	-	-	-	-	-
BARUGA	180	163	89	82	514
BARUGA DHUA	176	154	200	53	583
BUTTU BARUGA*)	-	-	-	-	-
JUMLAH	1 360	2 257	1 320	1 367	6 304

*) Data masih bergabung dengan desa/kelurahan induk

Sumber: Statistik Daerah Kec. Banggae Timur, 2012

B. Deskripsi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi

kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah :

- 1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya;
- 2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
- 3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- 5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Melalui PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan tahapan pemberdayaan, yaitu tercapainya kemandirian dan keberlanjutan, setelah

tahapan pembelajaran dilakukan melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Adapun tujuan khususnya, meliputi :

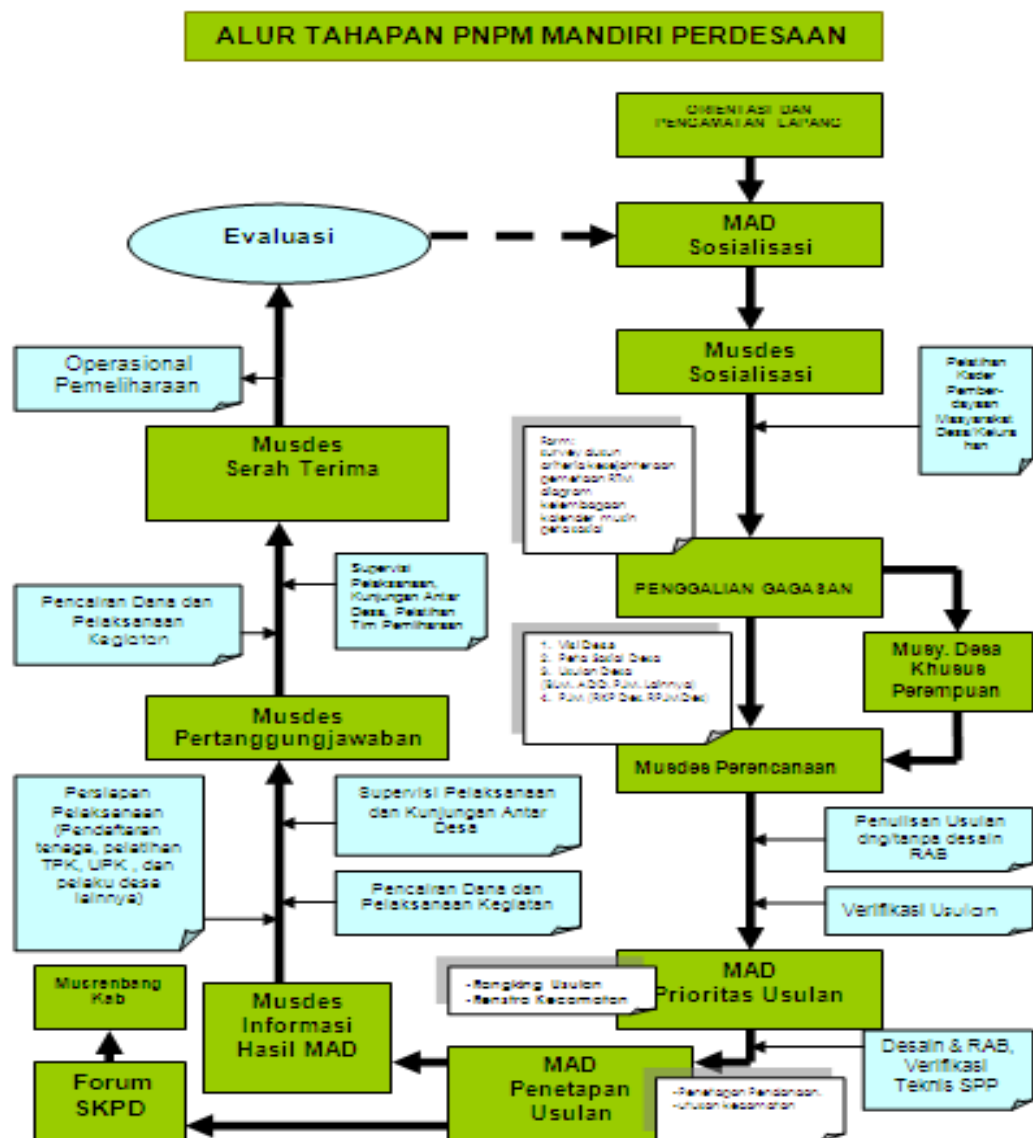
1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
2. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antar desa.
7. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai PNPM Mandiri Perdesaan, adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin.

- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal).
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP).

Gambar 4.2



C. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur, yaitu faktor : Komunikasi, Sumber Daya, Sikap Pelaksana, dan Struktur Organisasi. Keempat variabel tersebut merupakan variabel yang secara langsung maupun yang secara tidak langsung mempengaruhi efektivitas implementasi program atau kebijakan (Edwards III, 1980).

a. Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi yang dimaksud dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur, yaitu sosialisasi dan penyebaran informasi. Sosialisasi dan penyebaran informasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan merupakan upaya untuk memperkenalkan dan menyebarkan informasi mengenai program dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat.

Upaya ini juga diharapkan menjadi media pembelajaran mengenai konsep, prinsip, prosedur, kebijakan, tahapan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat luas. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat penerima manfaat langsung kegiatan, yakni Rumah Tangga Miskin; para pelaku program; instansi atau lembaga pendukung pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan lainnya, baik dari kalangan pemerintah dan swasta; serta kelompok masyarakat umum lainnya.

Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi dan penyebaran informasi adalah dimengerti dan dipahaminya konsep, prinsip prosedur,

kebijakan dan tahapan pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan secara utuh, khususnya masyarakat di lokasi program sebagai pelaku sekaligus sasaran penerima program, masyarakat umum, instansi atau lembaga lainnya. Dengan demikian, upaya pelebagaan dan pengintegrasian prinsip serta prosedur program dalam masyarakat dan sistem pemerintahan regular, dapat berjalan optimal.

Guna mencapai pemahaman yang utuh tentang PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi program, serta dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat luas terhadap keberadaan program, maka dalam pelaksanaannya, proses sosialisasi dan penyebaran informasi ini harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan oleh berbagai pihak. Baik dalam berbagai kesempatan dan kegiatan yang khusus dibuat oleh program maupun kesempatan dan kegiatan lain terdapat di setiap lokasi program.

Sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilakukan di tingkat kecamatan dan desa dalam rangka PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu :

1. Musyawarah Antar-Desa (MAD) Sosialisasi, yaitu pertemuan masyarakat antar desa untuk menyampaikan informasi awal mengenai tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perdesaan. Selain itu, MAD Sosialisasi juga merupakan pertemuan untuk menentukan kesepakatan -kesepakatan antar desa dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.

Adapun tujuan dari MAD Sosialisasi, yaitu :

- Mendiseminasikan informasi pokok PNPM Mandiri Perdesaan meliputi tujuan, prinsip-prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses dan prosedur yang dilakukan;
 - menginformasikan rencana program atau proyek dari kabupaten yang benar-benar akan dilaksanakan di kecamatan;
 - Menginformasikan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa dan antar desa, seperti: Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Tim Penulis Usulan (TPU), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), dan Setrawan Kecamatan;
 - Memilih dan menyepakati dua orang peserta menjadi Ketua dan Sekretaris (Notulis) MAD yang akan bertugas hingga akhir PNPM Mandiri Perdesaan;
 - Menyepakati dan menetapkan aturan dan sanksi-sanksi yang harus diterapkan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan;
 - Menyepakati jadwal kegiatan musdes sosialisasi, pelatihan KPMD dan MAD prioritas usulan.
2. Musyawarah Desa (Musdes) Sosialisasi, yaitu musyawarah masyarakat desa sebagai bagian sosialisasi atau penyebaran informasi PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa yang dilaksanakan segera setelah MAD Sosialisasi.

Adapun tujuan dari Musdes Sosialisasi, yaitu :

- Memperkenalkan PNPM Mandiri Perdesaan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD), aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat umum di desa;
- memilih Ketua TPK sebagai penanggung jawab operasional kegiatan di desa, Sekretaris dan Bendahara TPK;
- memilih dan menetapkan 2 orang KPMD, yaitu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;
- menyepakati dan menetapkan jadwal musyawarah desa informasi hasil MAD prioritas usulan;
- menyepakati pembuatan dan lokasi pemasangan Papan Informasi PNPM Mandiri Perdesaan dan media informasi lainnya.

3. Di samping itu, sosialisasi dan penyebaran informasi yang dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan dengan menggunakan media, yaitu :

- Papan Informasi (PI) merupakan tempat untuk menempelkan informasi yang perlu diketahui masyarakat. Selain sebagai sarana informasi, PI juga merupakan sarana pembelajaran (edukasi) prinsip transparansi dan akuntabilitas bagi masyarakat dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di lokasi tersebut.
- Poster menjadi media yang dapat menarik perhatian, baik karena ukurannya yang relatif besar, *layout* gambar yang menarik, serta pesan yang disampaikan. Oleh sebab itu, konsultan/fasilitator didorong untuk menempel poster-poster PNPM Mandiri Perdesaan di tempat umum/di tempat terbuka/di keramaian, agar dapat dilihat oleh

masyarakat umum. Poster-poster program juga harus selalu dipasang di kantor-kantor konsultan/fasilitator dan tempat-tempat musyawarah berlangsung.

- Spanduk menjadi salah satu alternatif media komunikasi yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan, memberitahukan sesuatu, meningkatkan kesadaran dan membangkitkan motivasi masyarakat. Misalnya untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan, meningkatkan kesadaran warga untuk turut menjaga/melestarikan hasil-hasil kegiatan, mengajak warga agar membayar pinjaman tepat waktu, dan lain-lain.
- Buletin, selain sebagai media pembelajaran, buletin merupakan media yang efektif untuk berbagi pengalaman/praktik terbaik (*best practices*) pelaksanaan program di lokasi. Oleh sebab itu, selain didorong untuk aktif menyampaikan informasi perkembangan kegiatan dan kisah menarik dari lokasi masing-masing untuk dimuat dalam buletin yang dibuat di tingkat nasional, perlu diupayakan pengadaan buletin lokal (warga) secara swadaya, yang disesuaikan dengan kebutuhan informasi masyarakat lokal.
- Surat kabar merupakan media cetak yang tepat untuk sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan, karena akses masyarakat terhadap media ini cukup tinggi. Selain sebagai media sosialisasi dan penyebaran informasi, media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, buletin) atau media massa lain, dapat berfungsi sebagai kontrol pelaksanaan kegiatan di lapangan.

b. Faktor Sumber Daya

Faktor sumber daya dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur, meliputi sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas yang dibutuhkan dalam implementasi program. Sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud, terdiri atas : komposisi, jumlah, tugas dan kewenangan staf dalam implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur. Sedangkan fasilitas yang dibutuhkan dalam implementasi program, yaitu informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan.

Staf yang mengelola PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur, terdiri atas : Camat, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Verifikasi (TV), Tim Pengamat, Pendamping Lokal (PL), Fasilitator Kecamatan, Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec), Setra Kecamatan, Badan Pengawas UPK (BP-UPK), dan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).

Adapun tugas dan kewenangan untuk masing-masing posisi tersebut, sebagai berikut :

1. C a m a t

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan pada desa-desa di kecamatan. Selain itu, Camat juga bertugas untuk mengesahkan usulan-usulan kegiatan yang telah disepakati dalam MAD untuk didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan, dalam bentuk Surat Penetapan Camat (SPC).

Tugas dan Tanggung jawab Camat, yaitu :

- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan;
- b. mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada di kecamatan;
- c. menyelenggarakan MAD;
- d. bersama Fasilitator Kecamatan dan PjOK mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayah kecamatan;
- e. memonitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari semua desa;
- f. membantu penyelesaian masalah PNPM Mandiri Perdesaan yang timbul di wilayahnya;
- g. melayani urusan administratif, antara lain : menandatangani surat penetapan tim verifikasi, pengurus UPK, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB), Surat Penetapan Camat (SPC) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPK dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dll;
- h. memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil kegiatan serta pengembalian pinjaman dana bergulir;
- i. menilai kinerja program di desa dan kecamatan;
- j. bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumen kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan dan non keuangan;

- k. mendorong dan memfasilitasi terbentuk dan berkembangnya Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD).
2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK)

PjOK adalah seorang Kepala Seksi (Kasi) Pemberdayaan Masyarakat atau pejabat lain yang mempunyai tugas pokok sejenis di kecamatan yang ditetapkan berdasar Surat Keputusan Bupati dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan operasional kegiatan dan keberhasilan seluruh kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan.

Tugas dan Tanggung jawab PJOK adalah :

- a. melaksanakan koordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya;
- b. melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan, yang meliputi aspek-aspek kegiatan sosialisasi, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian;
- c. memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantau proses pencairannya;
- d. menyelenggarakan rapat rutin bulanan bersama Fasilitator Kecamatan dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya yang bertujuan untuk membahas kemajuan kegiatan, masalah-masalah dan penyelesaiannya;
- e. membuat laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ke TK. PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten dengan tembusan kepada Camat;
- f. melaksanakan pengawasan teknis dan administrasi;

- g. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja UPK dan TPK;
- h. bersama Fasilitator Kecamatan memfasilitasi pelaksanaan MAD ;
- i. memantau dan/atau memfasilitasi kegiatan musyawarah desa di wilayahnya;

3. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

UPK adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Pengurus UPK terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus UPK berasal dari anggota masyarakat yang diajukan dan dipilih berdasarkan hasil musyawarah desa.

Tugas dan Tanggung jawab UPK, yaitu :

- a. bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan;
- b. bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;
- d. bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;
- e. melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;
- f. melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan bersama dengan pelaku lainnya;

- g. melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan ataupun non-keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program;
- h. membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada BKAD/MAD;
- i. membuat pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban disampaikan kepada seluruh pelaku desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan;
- j. melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) yang dibuat oleh desa dalam setiap tahapan proses PNPM Mandiri Perdesaan dan sesuai dengan ketentuan;
- k. melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pelaku desa;
- l. membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir;
- m. menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah;

- n. melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok atau pemanfaat;
 - o. membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan;
 - p. mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan;
 - q. melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan;
4. Tim Verifikasi (TV)

Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat dan instansi terkait yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, baik di bidang teknik prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan dan pelatihan ketrampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diajukan dalam musyawarah desa perencanaan usulan.

Peran tim verifikasi adalah melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada BKAD/MAD sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Tugas dan Tanggung jawab Tim Verifikasi adalah :

- a. memeriksa kelengkapan dokumen setiap usulan yang diajukan masing-masing desa;
- b. melakukan observasi lapangan untuk memeriksa kesesuaian yang ditulis dalam usulan dengan fakta di lapangan;
- c. memeriksa kesesuaian usulan dengan kriteria dan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, serta bersama dengan BKAD memeriksa keterkaitan usulan antar desa sebagai suatu konsep pengembangan wilayah;
- d. menyampaikan usulan kegiatan kepada Fasilitator Kabupaten agar dilakukan pemeriksaan kembali;
- e. membuat rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan usulan kegiatan;
- f. menyampaikan dan menjelaskan rekomendasi hasil pemeriksaan usulan kegiatan kepada peserta MAD.

5. Tim Pengamat

Tim pengamat adalah anggota masyarakat yang dipilih untuk memantau dan mengamati jalannya proses diskusi MAD, serta memberikan masukan/saran agar dapat berlangsung secara partisipatif.

Tugas dan Tanggung jawab Tim Pengamat, yaitu :

- a. hadir dalam MAD untuk mewakili kecamatan bukan mewakili desanya masing-masing,
- b. mengamati proses diskusi MAD prioritas usulan dan penetapan usulan serta memberikan masukan/saran agar dapat berlangsung secara partisipatif,

- c. menyampaikan hasil pengamatan proses diskusi sebagai masukan menjelang proses pengambilan keputusan dalam MAD dan ikut menyebarluaskan hasil kesepakatan musyawarah kepada warga kecamatan,
- d. membantu mengatasi konflik-konflik yang mungkin terjadi antara lain desa yang kecewa karena usulannya tidak lolos dalam diskusi MAD.

6. Pendamping Lokal (PL)

PL adalah tenaga pendamping dari masyarakat yang membantu Fasilitator Kecamatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan tahapan dan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Di setiap kecamatan ditempatkan satu orang PL.

Tugas dan Tanggung jawab PL, sebagai berikut :

- a. melakukan pemantapan terhadap pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di desa sesuai dengan pengaturan tugas dari Fasilitator Kecamatan;
- b. membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pemeriksaan kegiatan di lapangan;
- c. membantu Fasilitator Kecamatan dalam melakukan bimbingan pada KPMD mengenai kegiatan pemberdayaan, transparansi dan manajemen;
- d. membantu Fasilitator Kecamatan dalam melaksanakan pelatihan kepada TPK dan masyarakat;

- e. memberikan bimbingan dan masukan atau saran teknis maupun non teknis kepada Tim Pengelola Kegiatan;
- f. membuat gambar kerja sesuai petunjuk FT-Kec dan membantu dalam pembuatan gambar desain dan gambar purna laksana;
- g. membimbing dan memberi penjelasan kepada masyarakat mengenai cara-cara menjaga kelestarian lingkungan;
- h. memberikan bimbingan dan masukan tentang cara-cara administrasi, pembukuan serta pengarsipan Tim Pengelola Kegiatan;
- i. membantu dan membimbing Tim Pengelola Kegiatan dalam penyiapan serta proses pra audit;
- j. mengumpulkan informasi tentang aspek non teknis, antara lain : partisipasi, memeriksa keluhan masyarakat untuk disampaikan kepada Fasilitator Kecamatan;
- k. membimbing KPMD dalam menginventarisasi kebutuhan masyarakat dalam kaitannya dengan rencana jangka panjang masyarakat;
- l. memfasilitasi proses pemeliharaan hasil kegiatan, pengembangan dan pelestariannya, serta pengembalian pinjaman dana bergulir.

7. Fasilitator Kecamatan (FK)

Fasilitator Kecamatan merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing KPMD atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan.

Tugas dan Tanggung jawab Fasilitator Kecamatan, yaitu :

- a. menyebarluaskan dan mensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan
- b. memfasilitasi KPMD dalam pendataan RTM;
- c. menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan;
- d. memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan-tahapan PNPM Mandiri Perdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengan tetap memperhatikan penerapan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan;
- e. memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelaku-pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan (KPMD, PL, Tim Pengelola Kegiatan/ TPK, Unit Pengelola Kegiatan/ UPK, Tim Penulis Usulan, Tim Pengawas dll.);
- f. memberikan pelatihan-pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintahan lokal baik di desa dan antar desa (BPD, Kepala desa, aparat kecamatan, dll.);
- g. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD);
- h. melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap proses pencairan dan penggunaan dana PNPM Mandiri Perdesaan untuk dapat dipastikan penggunaannya secara terbuka dan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan yang sebenarnya;

- i. memfasilitasi dan membantu survei lapangan terhadap usulan kegiatan simpan pinjam dan kegiatan yang menunjang kualitas hidup seperti bidang pendidikan dan kesehatan (di luar bangunan atau prasarana);
- j. identifikasi kebutuhan bantuan teknis terhadap usulan kegiatan simpan pinjam, pendidikan dan kesehatan yang diperlukan;
- k. mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat;
- l. mengadakan pelatihan secara sederhana dan mudah dimengerti masyarakat berdasarkan atas hasil identifikasi kebutuhan pengetahuan dan ketrampilan;
- m. membantu Pendamping UPK dalam membimbing pengembangan hasil kegiatan ekonomi dari pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan sebelumnya dan kegiatan simpan pinjam;
- n. mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri;
- o. melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaan program dan kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan desa;
- p. melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upaya penanganannya kepada Fasilitator Kabupaten dengan tembusan kepada Camat u.p. PjOK;
- q. mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan;
- r. menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan;

- s. menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut;
- t. memastikan pengelolaan dana di UPK sesuai prosedur dan ketentuan, dan secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan kas dan rekening;
- u. mengumpulkan SPM dan SP2D serta melaporkan realisasi penggunaan dana dalam rangka pelaporan SAI Fasilitator Kabupaten.

8. Fasilitator Teknik (FT-Kec)

FT-Kec merupakan pendamping masyarakat yang berperan memfasilitasi masyarakat dalam setiap proses tahapan, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian serta membimbing KPMD atau pelaku-pelaku lainnya di desa dan kecamatan khususnya dalam bidang teknis.

Tugas dan Tanggung jawab FT-Kec, sebagai berikut :

- a. membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada seluruh KPMD;
- b. menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan masyarakat/desa;
- c. memfasilitasi dan membantu melakukan kegiatan survei dan pengukuran usulan kegiatan prasarana (termasuk usulan sarana kesehatan dan pendidikan, seperti: bangunan sekolah, bangunan pelayanan kesehatan);
- d. membantu dan memberikan bimbingan teknis dalam membuat desain dan gambar konstruksi, perhitung volume dan kebutuhan

bahan/peralatan, jadwal pelaksanaan dan RAB usulan prasarana sesuai kaidah-kaidah teknis dengan memperhatikan dampak lingkungan;

- e. membantu mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan terhadap usulan kegiatan prasarana, seperti pengadaan bahan dan alat, penggunaan alat berat dan melakukan supervisi dalam pelaksanaannya;
- f. memberikan pelatihan teknis konstruksi secara sederhana kepada kader teknis dan masyarakat yang melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan prasarana/sarana;
- g. melakukan review RKTL dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan di masyarakat serta memfasilitasi penanganan masalah berkaitan dengan kemajuan pelaksanaan fisik di lapangan;
- h. membantu FT-Kab dalam memeriksa kualitas dan kuantitas serta mengeluarkan dan mengesahkan sertifikasi terhadap penerimaan bahan dan alat, hasil pekerjaan atau konstruksi bangunan dan penyelesaian pekerjaan prasarana;
- i. memfasilitasi pembentukan tim pemelihara kegiatan sejak awal pengajuan usulan dan memberikan pelatihan untuk operasional dan pemeliharaan prasarana yang dibangun;
- j. membantu menghubungkan dengan para pihak terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan jenis usulan kegiatan prasarana yang ada baik di wilayah kecamatan maupun kabupaten;

- k. tugas atau aktifitas lain yang diperlukan masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan berkaitan dengan kegiatan prasarana;
- l. melaporkan kemajuan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang tugas bimbingan teknis dan upaya penanganan yang telah dilakukan;
- m. mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan;
- n. menghadiri rapat koordinasi bulanan di kabupaten dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara rutin;
- o. menjunjung tinggi kode etik fasilitator dan konsultan serta siap diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap kode etik tersebut.

9. Setrawan Kecamatan

Setrawan Kecamatan diutamakan pegawai negeri sipil di lingkungan kecamatan yang dibekali dengan kemampuan khusus untuk dapat melaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mental di kalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tata pemerintahan serta mendampingi masyarakat, khususnya dalam manajemen pembangunan partisipatif. Dalam hal tertentu, pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah dapat ditugaskan.

Tugas dan tanggung jawab Setrawan Kecamatan, sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan dan mensosialisasikan pembangunan partisipatif kepada masyarakat dan aparat desa/kecamatan;

- b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) pelaksanaan kegiatan bersama masyarakat dimulai dari proses sosialisasi hingga pelestarian kegiatan;
- c. memandu proses musrenbang kecamatan;
- d. memberikan informasi kebijakan pemerintah kabupaten dalam musrenbang desa;
- e. mendorong kerja sama antara masyarakat dengan pihak ketiga/swasta dalam pelaksanaan pembangunan;
- f. mendampingi utusan kecamatan dalam musrenbang kabupaten;
- g. memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapan pembangunan sesuai dengan mekanisme pembangunan reguler (Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional);
- h. memberikan pelatihan dan bimbingan peningkatan kapasitas pemerintah desa;
- i. memfasilitasi dan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat baik untuk peningkatan kapasitas masyarakat maupun peningkatan kapasitas pemerintahan desa;
- j. memfasilitasi penyusunan perdes yang partisipatif;
- k. mendorong terciptanya mekanisme kontrol atau pengawasan oleh masyarakat sendiri;
- l. melakukan koordinasi dengan setrawan kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan;
- m. mensosialisasikan hasil musrenbang kabupaten ke masyarakat dan aparat desa dan kecamatan;

- n. menyampaikan laporan bulanan di lokasi tugas tentang kemajuan pelaksanaan kegiatan, masalah dan kendala, serta rencana dan realisasi kegiatan kepada setrawan kabupaten.

10. Badan Pengawas UPK (BP-UPK)

BP-UPK adalah badan yang ditetapkan oleh MAD Prioritas Usulan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab UPK sehari-hari.

Tugas dan Tanggung jawab BP-UPK, sebagai berikut :

- a. melakukan pemeriksaan dan evaluasi transaksi, bukti transaksi, dokumen-dokumen, pelaksanaan administrasi dan pelaporan pengelolaan keuangan dan pinjaman yang dikelola oleh UPK;
- b. melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan;
- c. melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturan-aturan MAD, termasuk aturan perguliran;
- d. memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK;
- e. memantau Realisasi anggaran UPK dan rencana kerja UPK;
- f. memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MAD dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan;
- g. menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada MAD/BKAD.

11. Badan Kerja sama Antar Desa (BKAD)

BKAD adalah sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar desa di satu wilayah dalam satu kecamatan dan atau antar kecamatan dengan tujuan untuk melindungi dan melestarikan hasil-

hasil program yang terdiri dari kelembagaan UPK, prasarana-sarana, hasil kegiatan bidang pendidikan, hasil kegiatan bidang kesehatan, dan perguliran dana.

BKAD berfungsi untuk melakukan tugas pokok sebagai lembaga pengelola partisipasi masyarakat, kegiatan antar desa, aset produktif, serta program-program dari pihak ketiga. Dalam hubungan dengan lembaga-lembaga bentukan PPK (UPK, BP-UPK, TV, TPK, dan lain-lain) BKAD menjadi jalan keluar dari masalah status dan payung hukum. BKAD menjelaskan tentang status kepemilikan, keterwakilan, dan batas kewenangan.

Dalam kaitan dengan UPK, maka fungsi BKAD adalah merumuskan, membahas, dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan UPK dalam bidang *micro finance*, pelaksanaan program, dan pelayanan usaha kelompok. BKAD juga berperan dalam pengawasan, pemeriksaan, serta evaluasi kinerja UPK.

Berdasarkan informasi di atas, staf yang mengelola PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur dapat dilihat bahwa jumlah stafnya sudah cukup dan komposisinya juga sudah cukup. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing staf di setiap unit juga sudah dirinci berdasarkan Petunjuk Teknis PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Faktor Sikap Pelaksana

Faktor ini melihat sikap dan komitmen dari para pelaksana terhadap kebijakan atau program yang dilaksanakan, khususnya dari mereka yang implementor program dalam hal ini terutama dimaksudkan adalah aparatur birokrasi.

d. Faktor Struktur Organisasi

Faktor ini melihat adanya SOPs (*Standard Operating Procedures*) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Jika dalam hal ini SOPs tidak ada maka akan sulit sekali mencapai hasil yang memuaskan, karena segala sesuatu yang bersifat *ad hoc* akan memerlukan penanganan dan penyelesaian khusus tanpa pola yang jelas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- a. PNPM Mandiri Perdesaan adalah salah satu program pemerintah dalam membantu dan menanggulangi masyarakat miskin dengan menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Pemberdayaan yang tepat harus memadukan aspek-aspek penyadaran, peningkatan kapasitas dan pendayagunaan.

- b. Dalam proses implementasinya, PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Dimulai dari kegiatan sosialisasi, pelaksanaan siklus, pelatihan sampai evaluasi kegiatan.
- c. Implementasi PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Banggae Timur secara umum dipengaruhi oleh faktor : komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur organisasi. Adapun faktor yang mendukung dalam program tersebut, yaitu komunikasi dan struktur organisasi. Sedangkan faktor yang menghambat, yaitu sumber daya dan sikap pelaksana.

B. Saran

- a. Pemberdayaan masyarakat pada setiap desa berbeda-beda antar satu desa dengan yang lainnya sehingga indikator pemberdayaan masyarakat yang digunakan harus menyesuaikan dengan karakteristik desa itu dan karakteristik program yang dijalankan.
- b. Masyarakat selaku pelaksana sekaligus kelompok sasaran program pemberdayaan, belum sepenuhnya memahami keberdayaan dan tingkat kemandirian untuk mengelola pembangunan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, peran dan keberadaan fasilitator pendamping masih dibutuhkan sampai masyarakat benar-benar terbiasa dan bahkan membudaya dengan proses-proses pemberdayaan yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (1997). *Analisis Kebijaksanaan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (1998). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bappenas-Komite Penanggulangan Kemiskinan. (2004). *Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Bappenas.
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edward III, George. (1980) *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly Press.
- Narayan, Deepa. (2002). *Empowerment and Poverty Reduction : A Sourcebook*. Washington: The World Bank.
- Moleong, L.J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mazmanian, Daniel and Sabatier, Paul A. (1986). *Effective Policy Implementation*, Lexington Mass DC: Heath.
- Ripley, Randall and Franklin, Grace A. (1986). *Policy Implementation and Bureaucracy*. Illionis: The Dorsey Press.
- Royat, Sujana. (2009). Majalah Komite, edisi 1 Maret 2009.
- Sen, Amartya. (2002). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Wibawa, Samodra. (1994). *Kebijakan Publik : Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.

Situs Internet :

www.pnpm-perdesaan.or.id
www.majenekab.bps.go.id
www.majenekab.go.id

statistik daerah kecamatan banggae timur 2012